

Nama : Marista Febria Safutri

NPM : 2313031007

Kelas : A

UAS EKONOMI PENDIDIKAN

1. **a.** Analisis penggunaan anggaran pendidikan berdasarkan konsep efisiensi internal dan eksternal pendidikan.

Berdasarkan kasus yang diberikan, Pemerintah Kabupaten A telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 30% dari APBD. Namun, sebagian besar dana tersebut difokuskan pada pembangunan sarana fisik berupa gedung sekolah baru, sementara aspek yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran seperti pelatihan guru, pengembangan kurikulum, serta penyediaan media pembelajaran digital masih kurang mendapat perhatian.

Jika ditinjau dari konsep efisiensi internal pendidikan, penggunaan anggaran tersebut belum sepenuhnya efektif. Efisiensi internal mengacu pada kemampuan sistem pendidikan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan output pendidikan yang berkualitas. Meskipun pembangunan gedung sekolah berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah, hasil belajar siswa tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pada infrastruktur belum mampu meningkatkan mutu proses pembelajaran secara optimal karena kualitas guru dan metode pembelajaran belum berkembang secara maksimal.

Sementara itu, dari perspektif efisiensi eksternal, kebijakan tersebut juga belum memberikan hasil yang optimal. Efisiensi eksternal berkaitan dengan sejauh mana hasil pendidikan mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat dan dunia kerja. Ketika kualitas hasil belajar siswa tidak meningkat, maka kompetensi lulusan yang dihasilkan juga cenderung tidak mengalami perkembangan yang berarti. Akibatnya, kontribusi pendidikan terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi menjadi kurang maksimal.

- b.** Dampak kebijakan terhadap kualitas sumber daya manusia dan rekomendasi kebijakan.

Kebijakan yang lebih berorientasi pada pembangunan fisik sekolah memang mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan. Akan tetapi, peningkatan akses tersebut belum diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi tetapi belum memiliki keterampilan, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis yang memadai.

Dampak lainnya adalah rendahnya daya saing lulusan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tuntutan pasar kerja modern. Apabila kondisi ini

terus berlanjut, maka tujuan pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul akan sulit tercapai.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan perbaikan kebijakan dengan mengalokasikan anggaran secara lebih proporsional antara pembangunan fisik dan peningkatan mutu pendidikan. Program pelatihan guru perlu ditingkatkan secara berkelanjutan, kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, serta penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran harus diperluas. Selain itu, evaluasi berkala terhadap penggunaan anggaran juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan mampu memberikan manfaat yang maksimal terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

2. **a. Bentuk ketimpangan pendidikan pada kasus tersebut**

Kasus tersebut menunjukkan adanya ketimpangan pendidikan yang cukup nyata antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sekolah di wilayah perkotaan memiliki fasilitas pendidikan yang lebih lengkap seperti laboratorium modern, akses internet yang memadai, serta tenaga pendidik yang profesional. Sebaliknya, sekolah di wilayah pedesaan masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi fasilitas maupun kualitas sumber daya manusia.

Ketimpangan ini dapat dikategorikan sebagai ketimpangan akses pendidikan, ketimpangan kualitas layanan pendidikan, dan ketimpangan sarana serta prasarana. Perbedaan kondisi tersebut menyebabkan siswa di daerah pedesaan tidak memperoleh kesempatan belajar yang sama dengan siswa di daerah perkotaan. Akibatnya, kemampuan akademik dan prestasi belajar siswa menjadi berbeda secara signifikan.

b. Dampak ekonomi jangka panjang dan solusi kebijakan

Dalam jangka panjang, ketimpangan pendidikan dapat menimbulkan berbagai dampak ekonomi yang serius. Rendahnya kualitas pendidikan di daerah pedesaan dapat menyebabkan produktivitas tenaga kerja menjadi lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Kondisi ini akan memperbesar kesenjangan pendapatan dan memperlambat upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, ketimpangan pendidikan juga dapat menghambat pemerataan pembangunan ekonomi karena daerah yang memiliki kualitas pendidikan rendah akan kesulitan menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif. Akibatnya, investasi dan peluang kerja cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah perlu melakukan pemerataan kualitas pendidikan melalui pembangunan sarana pendidikan yang memadai di daerah terpencil, penyediaan akses internet yang merata, serta distribusi guru yang lebih adil. Pemberian insentif kepada guru yang bertugas di daerah terpencil juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah pedesaan.

3. **a. Analisis penyebab pengangguran terdidik berdasarkan teori human capital.** Menurut teori Human Capital yang dikemukakan oleh Theodore Schultz dan Gary Becker, pendidikan merupakan suatu bentuk investasi yang dilakukan individu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas

sehingga dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik serta pendapatan yang lebih tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar pula nilai modal manusia (human capital) yang dimilikinya.

Namun, pada kasus di Kota B, peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi tidak diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja yang sesuai. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Berdasarkan teori human capital, kondisi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor.

- Terjadinya mismatch atau ketidaksesuaian kompetensi antara hasil pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Perguruan tinggi mungkin lebih banyak memberikan pengetahuan teoritis dibandingkan keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh industri. Akibatnya, lulusan memiliki ijazah tetapi belum memiliki kemampuan yang relevan dengan tuntutan pekerjaan.
- Kualitas human capital yang dihasilkan belum optimal. Meskipun jumlah lulusan meningkat, kualitas keterampilan seperti kemampuan teknologi, komunikasi, kerja sama tim, pemecahan masalah, dan berpikir kritis masih belum memenuhi standar yang diharapkan perusahaan. Kondisi ini menyebabkan lulusan sulit bersaing dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
- Perkembangan dunia industri yang lebih cepat dibandingkan sistem pendidikan. Perubahan teknologi dan kebutuhan pasar kerja berlangsung sangat dinamis, sedangkan kurikulum perguruan tinggi sering kali terlambat menyesuaikan diri. Akibatnya, kompetensi yang dipelajari mahasiswa selama masa kuliah tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri saat mereka lulus.
- Kurangnya pengalaman kerja dan praktik lapangan. Banyak lulusan memiliki pengetahuan akademik yang cukup baik, tetapi minim pengalaman kerja nyata. Padahal, sebagian besar perusahaan saat ini tidak hanya mempertimbangkan ijazah, tetapi juga pengalaman dan keterampilan yang dapat langsung diterapkan di tempat kerja.
- Terjadinya kelebihan pasokan tenaga kerja terdidik (oversupply). Jumlah lulusan perguruan tinggi yang terus meningkat tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Akibatnya, persaingan untuk memperoleh pekerjaan menjadi semakin ketat dan sebagian lulusan terpaksa bekerja di luar bidang studinya atau bahkan menganggur.

Dengan demikian, berdasarkan teori human capital, pengangguran terdidik pada kasus tersebut terjadi karena investasi pendidikan yang dilakukan belum menghasilkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan, penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri, penguatan program magang, serta pengembangan keterampilan teknis dan nonteknis agar lulusan memiliki daya saing yang lebih tinggi di dunia kerja.

b. Hubungan antara pendidikan dan pasar kerja serta rekomendasi.

Pendidikan dan pasar kerja memiliki hubungan yang sangat erat karena pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk mempersiapkan sumber daya manusia

yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Melalui proses pendidikan, individu diharapkan mampu mengembangkan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga dapat berkontribusi secara produktif dalam kegiatan ekonomi.

Pada kasus di Kota B, hubungan antara pendidikan dan pasar kerja belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahun, tetapi masih banyak yang menganggur atau bekerja di luar bidang studinya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian (mismatch) antara kompetensi yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri. Perguruan tinggi telah menghasilkan banyak lulusan, namun kualitas dan keterampilan yang dimiliki belum sepenuhnya memenuhi tuntutan pasar kerja yang terus berkembang. Selain itu, dunia kerja saat ini tidak hanya membutuhkan kemampuan akademik, tetapi juga keterampilan praktis, kemampuan beradaptasi dengan teknologi, komunikasi, kerja sama tim, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah. Apabila kurikulum pendidikan masih berfokus pada teori tanpa memberikan pengalaman praktik yang memadai, maka lulusan akan mengalami kesulitan dalam memasuki pasar kerja. Akibatnya, tingkat pengangguran terdidik meningkat dan produktivitas tenaga kerja menjadi kurang optimal. Untuk meningkatkan relevansi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan.

- Perguruan tinggi perlu melakukan penyesuaian kurikulum secara berkala agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.
- Kerja sama antara perguruan tinggi dan dunia usaha perlu diperkuat melalui program magang, praktik kerja lapangan, dan kegiatan pembelajaran berbasis proyek.
- Mahasiswa perlu dibekali dengan keterampilan abad ke-21, seperti kemampuan digital, komunikasi, kepemimpinan, berpikir kritis, dan pemecahan masalah.
- Perguruan tinggi perlu meningkatkan program sertifikasi kompetensi agar lulusan memiliki bukti kemampuan yang diakui oleh dunia kerja.
- Pengembangan jiwa kewirausahaan juga perlu didorong agar lulusan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

Dengan demikian, pendidikan dan pasar kerja harus saling terhubung dan mendukung satu sama lain. Apabila kompetensi yang diberikan oleh lembaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri, maka peluang kerja bagi lulusan akan meningkat, tingkat pengangguran terdidik dapat ditekan, dan kualitas sumber daya manusia akan semakin baik.

4. a. Analisis berdasarkan konsep pendidikan sebagai barang publik dan barang privat.

Dalam ilmu ekonomi pendidikan, pendidikan dipandang sebagai barang publik sekaligus barang privat. Sebagai barang publik, pendidikan memberikan manfaat yang dirasakan oleh seluruh masyarakat, seperti peningkatan kualitas sumber

daya manusia, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, sebagai barang privat, pendidikan memberikan manfaat langsung kepada individu berupa peningkatan peluang kerja dan pendapatan. Kenaikan uang kuliah sebesar 25% menunjukkan bahwa universitas berupaya meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas pendidikan. Namun, kebijakan tersebut juga dapat membatasi akses pendidikan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Dengan demikian, aspek pendidikan sebagai barang privat menjadi lebih dominan dibandingkan fungsi sosialnya sebagai barang publik.

b. Dampak sosial ekonomi dari kenaikan biaya pendidikan.

Kenaikan biaya pendidikan sebesar 25% dapat menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi bagi mahasiswa maupun masyarakat. Dari sisi ekonomi, kebijakan tersebut meningkatkan beban pengeluaran keluarga, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Sebagian mahasiswa mungkin mengalami kesulitan membayar uang kuliah, bahkan berisiko menunda atau menghentikan pendidikannya karena keterbatasan biaya.

Dari sisi sosial, kenaikan biaya pendidikan dapat mengurangi akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan memperlebar kesenjangan antara kelompok ekonomi mampu dan kurang mampu. Jika hanya masyarakat yang memiliki kemampuan finansial yang dapat melanjutkan pendidikan tinggi, maka kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan menjadi tidak merata.

Selain itu, dalam jangka panjang, kenaikan biaya pendidikan dapat menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia karena sebagian masyarakat tidak memperoleh kesempatan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, meskipun peningkatan fasilitas kampus penting dilakukan, kebijakan biaya pendidikan juga perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa agar akses pendidikan tetap terjangkau bagi semua kalangan.

c. Pentingnya intervensi pemerintah.

Menurut pendapat saya, pemerintah perlu melakukan intervensi karena pendidikan merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Intervensi dapat dilakukan melalui pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan, subsidi pendidikan tinggi, serta penyediaan program pinjaman pendidikan dengan bunga rendah. Langkah tersebut diperlukan agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tinggi tanpa terhambat oleh keterbatasan ekonomi.

5. **a. Analisis menggunakan konsep biaya pendidikan dan opportunity cost.**
Penerapan pembelajaran digital memang memberikan berbagai kemudahan dalam proses belajar mengajar. Namun, sistem ini juga memerlukan biaya tambahan berupa pembelian perangkat elektronik, kuota internet, serta biaya pemeliharaan teknologi. Bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi, biaya tersebut dapat menjadi hambatan dalam mengakses pendidikan.

Dalam konsep opportunity cost, keluarga harus mengorbankan kebutuhan lain untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran digital. Misalnya, sebagian pendapatan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga harus dialihkan untuk membeli kuota internet atau perangkat belajar. Pengorbanan tersebut menjadi semakin berat bagi keluarga yang memiliki pendapatan rendah.

b. Dampak kesenjangan digital dan solusi kebijakan.

Kesenjangan digital dapat menyebabkan terjadinya perbedaan kesempatan belajar antara siswa yang memiliki akses teknologi dan siswa yang tidak memiliki akses yang memadai. Akibatnya, kualitas pembelajaran menjadi tidak merata dan prestasi belajar siswa cenderung berbeda.

Selain itu, kesenjangan digital juga dapat memperlebar ketimpangan pendidikan yang sudah ada sebelumnya. Siswa yang tidak memiliki perangkat dan akses internet yang memadai berisiko tertinggal dalam penguasaan materi pembelajaran maupun keterampilan teknologi.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah perlu menyediakan bantuan perangkat belajar bagi siswa kurang mampu, memberikan subsidi kuota internet pendidikan, memperluas pembangunan infrastruktur jaringan internet di daerah terpencil, serta mengembangkan platform pembelajaran yang mudah diakses dengan biaya rendah. Dengan demikian, seluruh siswa dapat memperoleh kesempatan belajar yang lebih adil dan merata.